

Manajemen Tata Kelola Dana Desa Sebagai Peningkatan Pembangunan Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Sufyan ^{1*}, Tarmizi ², Maimun ³

^{1*} Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Indonesia Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{2,3} Program Studi Sistem Informasi, STMIK Indonesia Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

*Correspondence email:
sofyans.ars@gmail.com ^{1*}

Received: 12 November 2022

Accepted: 20 December 2022

Published: 30 December 2022

Full list of author information is available at the end of the article.

Abstract

Rural development in its implementation receives funds from the Regional Revenue and Expenditure Budget which is called the Allocation of Village Funds and the State Revenue and Expenditure Budget which is called the Village Fund. The characteristics of village development have a multidimensional nature concerning all aspects of community life in the village. The data analysis used was an analysis technique that was carried out throughout the research since the data collection began, data analysis was carried out continuously until the research report was prepared. Based on the results of the research, it was found that the government of Gampong Alue Naga, Syiah Kuala District, Banda Aceh had carried out a planning process in the context of managing gampong development as outlined in the Gampong Medium Term Development Plan (RPJMG) and in the Gampong Government Work Plan (RKG) which became a reference in structuring the Budget. Gampong Income and Expenditure (APBG) using the Village Fund which is planned to involve the village community as a whole. In the process of organizing the gampong government formed an Activity Management Team (TPK) in managing village funds, involving all Human Resources (HR) owned in Alue Naga village, Syiah Kuala District, Banda Aceh. In the process of carrying out the development, the village government of Alue Naga involves workers from the community in general, and according to their respective expertise so that the work of development activities is carried out in accordance with the plans set out in the APBG.

Keywords: Governance Management; Village Fund; Village Development; Gampong Alue Naga.

Abstrak

Pembangunan desa dalam pelaksanaannya mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut Dana Desa. Karakteristik pembangunan desa bersifat multidimensional yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang dilakukan selama penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilakukan secara terus menerus hingga laporan penelitian disusun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh telah melakukan proses perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan gampong yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), dan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKG) yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dengan menggunakan Dana Desa yang direncanakan melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Dalam proses pengorganisasian pemerintah gampong membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan dana desa, melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki di desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa Alue Naga melibatkan tenaga kerja dari masyarakat pada umumnya dan sesuai dengan keahlian masing-masing agar pekerjaan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBG.

Kata Kunci: Manajemen Tata Kelola; Dana Desa; Pembangunan Gampong Gampong Alue Naga.



1. Pendahuluan

Organisasi pemerintahan Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala telah berjalan dengan baik dan optimal, sehingga pertumbuhan dan perubahan sosial di Gampong Alue Naga telah menunjukkan hasil yang relatif nyata. Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian pembangunan, kata kuncinya adalah diperlukan pengelolaan yang sistematis. Dalam konteks ini, sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat pada manajemen pembangunan desa berfungsi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, aspek kemampuan aparatur pemerintah desa sebagai penentu dan penyelenggara penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan desa. Nilai keadilan terkait dengan pemenuhan hak warga negara yang harus dilayani secara baik dan menyeluruh oleh pemerintah desa.

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan kemampuan manajerial aparatur pemerintah desa yang handal dalam upaya memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan tujuan keberadaan lembaga pemerintah sebagai organisasi publik. Secara empiris pelaksanaan dan penerapan fungsi manajemen pemerintahan di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah berjalan optimal dalam pengelolaan dana pembangunan dimana dana pembangunan bersumber dari dana desa hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota. Banda Aceh dalam rangka peningkatan pembangunan agar terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan perencanaan awal yang merupakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Gapong Alue Naga, dan dari beberapa paket pembangunan fisik sudah menunjukkan hasil yang nyata karena telah ditangani oleh para profesional di bidangnya.

Perihal di atas dapat dilihat dari manajemen dalam pengaturan berbagai kegiatan pembangunan sudah teratur dan transparan. Pembangunan sudah sesuai dengan rencana sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada Daftar Usulan Rencana Kegiatan yang di susun dan direncanakan oleh pemerintah desa dan Tuha Peut Gampong (TPG) yang berawal dari usul masyarakat desa, hal ini dapat dibuktikan dengan ikut sertanya masyarakat maupun anggota TPG dalam penyusunan RAPG tersebut. Proses pelaksanaan pembangunan juga telah mengikuti sertakan seluruh unsur masyarakat sebagai pelaksana kegiatan, sehingga aspek kualitas dan kepentingan masyarakat desa sudah terpenuhi. Begitu pula pada aspek pengawasan hasil pembangunan, selalu dipantau dan diawasi oleh TPG. Demikian pula, sejauh ini pelaksanaan pembangunan desa sudah berlangsung dengan baik dan sesuai aturan-aturan pembangunan gampong, dan sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

Fenomena di atas menguatkan asumsi bahwa kemampuan manajerial aparat pemerintah gampong dalam mengelola manajemen pengelolaan gampong sudah mulai menunjukkan hasil yang baik dalam penggunaan dana desa, bahkan aktivitas pengelolaan oleh aparat pemerintah gampong sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini, dapat membuat kualitas manajemen pemerintahan gampong yang mendukung keberhasilan pembangunan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan pembangunan desa merupakan keterpaduan antar berbagai kebijakan pemerintah dengan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat, dengan kemampuan perangkat pemerintah desa dalam menciptakan iklim keterpaduan yang seri dan berkesinambungan dalam memanfaatkan segala sumber daya di desa untuk didayagunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa sudah berjalan dengan baik.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam observasi dan penelitian sosial (Sugiyono, 2013). Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan prilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empiris dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.

Adapun fokus dalam penelitian dalam hal ini adalah, pertama, kemampuan manajerial aparat pemerintahan desa yang didefinisikan dengan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, sehingga dapat melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa

dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memiliki kepekaan terhadap pandangan maupun pandangan aspirasi rakyat yang hidup dalam masyarakat ini dikaji dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut : Perencanaan (Perencanaan), Pengorganisasian (Organisasi), Pelaksanaan (Pelaksanaan), Pengendalian (Pengawasan). Sedangkan Data dan Informasi diperoleh dari Apartur Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

3. Hasil

3.1 Sistem Pengelolaan

Pengelolaan Manajemen Dana Desa yang dilakukan di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dilihat dari berbagai aspek yaitu Perencanaan, Perorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pada aspek perencanaan sebagaimana hasil investigasi yang dilakukan menunjukkan perencanaan pembangunan yang ada di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh desa sudah maksimal terlihat dari segi melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan, dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa untuk menggunakan anggaran dari Dana Desa hal ini kita dapat melihat hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) yang melibatkan unsur masyarakat sehingga RPJMG tepat sasaran.

Dalam setiap merencanakan pembangunan gampong berbagai alternatif yang mungkin dapat dilakukan yang meliputi berbagai aspek, strategi, kebijakan, dalam menyusun program/proyek dan sesuai prosedur dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan gampong. Dalam rangka menjalankan program pemerintah pusat yang menghibahkan Dana Desa kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sebagai salah satu penerimanya harus mampu memaksimalkannya. Pembangunan yang menggunakan dana desa dilakukan dengan mengacu pada peraturan undang-undang perturan menteri dalam Negeri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan gampong di dalam perencanaan pembangunan disusun secara berjangka yang terdiri : pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gmpong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lama 3 bulan sejak Kepala Desa dilantik, dan kedua Rencana Pembangunan Tahunan Gampong atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG), merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, peraturan Gampong Susun dan ditetap oleh pemerintah gampong pada bulan Juli tahun berjalan.

Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa dalam rangka proses membuat RPJMG dan RPKG harus diselenggarakan suatu bentuk Musyawarah pembangunan gampong, MUSREMBANG Gampong yang melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di gampong yang dimulai dari tiap dusun dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya gampong, dan masalah yang diungkapkan Gampong. Hasil aspirasi gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Proses pengelolaan gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat gampong sebagai sumber data dan informasi melalui Musyawarah Dusun, Musyawarah Gampong atau Musyawarah Khusus unsur masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam proses perencanaan pembangunan di desa karena hasil dari RPJMG dan RKPG adalah dasar penyusunan APBG di gampong untuk menyelenggarakan pembangunan di tingkat gampong, melihat hal tersebut menunjukkan bahwa di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dalam melakukan pembangunan desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perencanaan-undangan tentang tatacara begaimana perencanaan pembangunan yang harus dilakukan di gampong karena juga pemerintah desa sudah dapat membuat semua dokumen-dokumen pelaksanaan musyawarah pembangunan yang dilakukan aparatur Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh seperti berita acara, daftar hadir dan lain sebagainya sebagai bukti tranparansi kegiatan yang dilaksanakan. Pada aspek Pengorganisasian dilihat yang terjadi di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh terlihat bahwa pengorganisasian sudah maksimal karena koordinasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai pembentukan tim pengelola kegiatan dan berdasarkan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan tugas, fungsi dan berwenang sebagai unsur pelaksanaan kegiatan sudah memenuhi batasan yang diharapkan. Berdasarkan kemampuan dari sumber daya manusia yang ada telah memfungsikan pengorganisasian adalah usaha untuk mengelompokkan pekerjaan yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, fungsi ini semua kegiatan manajemen yang

diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang , pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit organisasi seperti penugasan, pelimpahan dan berwenang untuk melaksakan pekerjaan hubungan informasi vertikal maupun horizontal dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien.

3.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut ini : 1. Pemerincian semua pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. 2. Pembagian beban kerja secara merata sehingga kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu orang. Pembagian kerja sebaiknya jangan sampai menumpuk sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga banyak waktu mengganggu, tidak efisien dan mengeluarkan biaya yang tidak perlu. 3. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidaksesuaian serta menghindari konflik-konflik yang dapat mengganggu pekerjaan. 4. Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses, akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses ini akan mencerminkan struktur organisasi, yang mencakup aspek - aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu: pembagian kerja, 2) departementalisasi , 3) bagan organisasi formal, 4) urutan perintah dan kesatuan perintah, 5) tingkatan hirarki manajemen, 6) saluran komunikasi, 7) penggunaan komite, 8) rentang manajemen.

Melihat hal-hal tersebut dalam pengorganisasian tim sebagai unsur penyelenggaraan dan pengunaan dana desa sudah terlihat secara cermat tentang kemampuan dari pada angota Tim yang didudukan berdasarkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki berdasarkan Sumber daya manusia yang dimiliki, dengan menempatkan SDM yang ada digampong dalam struktur pengelola keorganisasian dana desa. Pada aspek Pelaksanaan pengunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh berdasarkan dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sudah maksimal sesuai yang dihadapi masyarakat setempat, pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang menilai bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan bestek, karena yang melakukan proses pelaksanaan pekerjaan adalah orang profesional dalam pelaksana pembangunan di gampong.

3.3 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan tahapan pemanfaatan dana dalam Siklus kegiatan pengunaan dana desa. Kegiatan dalam tahapan ini pada garis besar tahap pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Suatu rencana kerja hendaklah dibuat seri mungkin agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut tidak cukup mudah, apalagi ada keterbatasan kemampuan personel teknis dalam menyusun perencanaan dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencanakan kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya kelemahan-kelemahan dalam perencanaan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi atau penajaman kembali rencana kerja sebelum pelaksanaan dimulai. Penajaman rencana kerja disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KSM selaku pelaksana kegiatan pembangunan, khususnya oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibentuk, dengan tujuan untuk memperoleh suatu rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih rinci dari rencana kerja awal sehingga lebih siap dijalankan dilapangan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi adanya perubahan-perubahan dalam rencana kerja awal baik yang disebabkan oleh adanya pemahaman baru yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi lapangan dilokasi prasarana, ketersediaan tenaga kerja, bahan, peralatan ataupun kondisi Tim Pelaksana kegiatan itu sendiri, dan lain-lain -Lain yang akan mempengaruhi metode kerja pelaksanaan untuk mencapai target-target yang telah ditentukan dalam pelaksanaan konstruksi. Penajaman rencana kerja yang dicakup disini antara lain adalah rencana jadwal pelaksanaan, rencana pengadaan/mobilisasi tenaga kerja/ bahan/alat, rencana tim pelaksana lapangan, rencana calon Tenaga Kerja yang akan terlibat, termasuk rencana pelatihan biaya dan konstruksi teknis bagi tim pelaksana lapangan. Pelaksanaan hal tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi atau memeriksa kembali dari setiap rencana yang telah ada, apakah semua hal yang diuraikan pada rencana semula masih dapat diterapkan dilapangan. Jika ada rencana yang perlu disesuaikan kembali maka dapat langsung diperbaiki. Hasil dari perubahan inilah yang selanjutnya akan digunakan oleh Tim Pelaksana Lapangan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, disamping juga sebagai alat monitoring suatu pekerjaan dilapangan nantinya.

Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu; Lingkup kegiatan, dokumen perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan dan nilai perjanjian kerja. Hal-hal khusus yang masuk dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban para pihak, tahap pencairan dana, penyelesaian pekerjaan dan pemeliharaan hasil pekerjaan. Sedangkan hal-hal umum yang perlu diatur dalam kesepakatan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan seperti: sanksi, force majeure dan penyelesaian konflik. Tahapan dan mekanisme perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dana desa merujuk pada diagram di bawah ini yang telah ditetapkan oleh kebijakan desa dan daerah tertinggal dan transmigrasi di bawah ini.



Gambar 1. Gambar Diagram Tahapan Penyusunan Dana Desa

4. Kesimpulan

Pada penelitian manajemen pengelolaan dana desa di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh bahwa dalam menjalankan Pemerintah Desa Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh telah melakukan proses perencanaan dalam rangka menajeman pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMG dan di RKPG yang menjadi acuan dalam penyusunan APBG dengan menggunakan dana yang direncanakan akan melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan (TPK) dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa telah membuat surat keputusan masing-masing kegiatan dengan memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Pada proses pelaksanaan yang dilakukan proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum dengan memperhatikan keahlian yang dimiliki dari para pekerja pelaksana pembangunan di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sehingga pekerjaan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pada proses pengawasan pembagunan yang dilakukan oleh masyarakat dan Tuha Peut Gampong (TPG) sudah sangat baik, hal ini terlihat dengan diterimanya pembangunan tersebut oleh masyarakat di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Referensi

- Atmosudirjo, P. (2005). Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta:
- Andi.Handoko, T H. (2002). Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedua belas. Yogyakarta: BPFE.
- Herlambang, S. (2016). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Gosyen: Penerbitan.
- Nawawi, H. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Siagian, S P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Schein, E H. (2008). Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima
- Sutomo, B. (2008). Variasi Mie dan Pasta. PT. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Terry, G R dan Rue, L W. (2009). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Terry, G R. dan Rue, L W. (2005). Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, GR dan Rue, L W. (2010). Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, I D. (2008). Manajemen. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

How Cites

Sufyan, Tarmizi, & Maimun. (2022). Manajemen Tata Kelola Dana Desa Sebagai Peningkatan Pembangunan Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 32–37. <https://doi.org/10.58477/ebima.v1i2.38>.

Publisher's Note

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/ebima>.